

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BONATUA LUNASI
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN BONATUA LUNASI**



SALINAN

**BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474)
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah: Bab I Pendahuluan;
Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Bab V Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati in

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V

TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r.
- s.
- t. Satuan Polisi Pamong Pra

5. Badan-Badan:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:

- a. Kecamatan Tampahan;
- b. Kecamatan Balige;
- c. Kecamatan Laguboti;
- d. Kecamatan Sigumpar;
- e. Kecamatan Silaen;
- f. Kecamatan Siantar Narumonda;
- g. Kecamatan Porsea;
- h. Kecamatan Uluan;
- i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- j. Kecamatan Parmaksian;
- k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- l. Kecamatan Lumban Julu;
- m. Kecamatan Ajibata;
- n. Kecamatan Habinsaran;
- o. Kecamatan Borbor;
- p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MEMERINTAHKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Tahun 2025. RENJA Kecamatan Bonatua Lunasi merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Bonatua Lunasi.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja

Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Tahun 2026, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Lumban Lobu, September 2025
Camat Bonatua Lunasi



Judiman Silitonga, SE
Pembina/IVa
196809291988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renja SKPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonatua Lunasi	12
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bonatua Lunasi	18
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Rencana Kerja Kecamatan Bonatua Lunasi	29
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	55
LAMPIRAN	
Tabel 2.1 (Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaianRenstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Toba)	
Tabel 2.2 (Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Daftar Usulan Kegiatan Kecamatan)	
Tabel 2.3 (Tabel Layanan Administrasi Umum di Kecamatan Bonatua Lunasi)	
Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD TA 2026 Kab Toba)	
Tabel 2.5 (Tabel T-C. 32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	
Tabel 3.1 (Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PerangkatDaerah Tahun 2026 danPerkiraan Maju Tahun 2027)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian, dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan Kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

Adapun acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bonatua Lunasi adalah mengacu pada RPJPD Kabupaten Toba Samosir yang maksudnya untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan. Selanjutnya bahwa Rencana Kerja ini disusun mempedomani TUPOKSI sehingga dalam pelaksanaan RENJA ini benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai Aparatur Daerah/ Kabupaten. Walaupun dalam pelaksanaannya bahwa ada beberapa Program yang disusun berdasarkan isu-isu yang strategis yang perlu mendapat penanganan mendesak dan secepatnya dan juga program yang disusun berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan.

Oleh sebab itu bahwa Kecamatan Bonatua Lunasi tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut pengejawantahan atau penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Toba dalam bentuk Program dan Kegiatan yang sudah barang tentu menjadi acuan

Kantor Camat Bonatua Lunasi sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan untuk menjabarkan atau menindaklanjuti Visi- Misi tersebut

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten DaerahTingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bonatua Lunasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas perencanaan kegiatan strategis di Kecamatan Bonatua Lunasi guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan oleh Pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka RENJA Kecamatan Bonatua Lunasi ini disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Bonatua Lunasi untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi kabupaten Toba yang dijabarkan dalam 1 (satu) tahun Anggaran
2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Bonatua Lunasi dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam 1 (satu) tahun.
3. RENJA Kecamatan Bonatua Lunasi ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Kecamatan Bonatua Lunasi yang selanjutnya dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan untuk tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan Bonatua Lunasi yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Renja ini dibuat.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN BONATUA LUNASI TAHUN LALU.

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BONATUA

LUNASI

Bab ini memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan dari Renja Kecamatan Bonatua Lunasi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BONATUA LUNASI

Bab ini memuat Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BONATUA LUNASI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi

Rencana Kerja Bonatua Lunasi Tahun 2026 merupakan uraian kegiatan periode tahun pertama dari Rencana Strategis Kecamatan Bonatua Lunasi Periode tahun 2025-2029 yang tentunya dalam penyusunannya juga dipertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui dan dipertimbangkan program kerja yang memenuhi dan tidak memenuhi target, kegiatan prioritas yang perlu dilanjutkan dan menjadi evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Dalam hal ini yang perlu dievaluasi pelaksanaannya adalah perkiraan capaian periode tahun lalu, dimana akan direview hasil evaluasi antara realisasi Renstra dengan Realisasi Renja yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Program kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan antara lain

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a) Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Sub Kegiatan pengadaan mebel
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas/jabatan
- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditentukan antara lain:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a) Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub kegiatan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub kegiatan Fasilitas kunjungan tamu
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
3. Program /Kegiatan Renja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

meliputi:

- Program dan Kegiatan Renja tahun lalu tidak ada yang melebihi target kinerja

Faktor tidak tercapainya target yang ditentukan sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun lalu adalah disebabkan antara lain kesalahan penginputan target pada renja dan tidak ada pegawai yang mengisi jabatan-jabatan struktural yang memiliki posisi strategis dalam kegiatan di kantor Kecamatan Bonatua Lunasi sehingga Kecamatan Bonatua Lunasi melaksanakan Program dan Kegiatan yang benar-benar menjadi Skala Prioritas dan mendesak dilaksanakan.

Akibat dari sebagian target Renja dan Renstra tidak dapat dilaksanakan, maka dapat mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga Kecamatan Bonatua Lunasi mensiasatinya dan mengambil kebijakan dengan melaksanakan sebagian program dan

kegiatan dengan mengandalkan partisipasi dan dukungan dari stake holder dan masyarakat.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak tercapainya target yaitu diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan dan kewenangan terhadap kegiatan yang prioritas di Kecamatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Bonatua Lunasi dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut :

Tabel 2.1 (Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Toba)

Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinejra Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2024						Target Program / Kegiatan Tahun berjalan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
													Target Renja Tahun 2024		Realisasi Renja Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5		6		7		8		9 = (7/6)		10		11 = (5+7+9)		12 = (10/4) x 100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	100.00	119,970,000.00	42.86	121,774,500.00	100%	109,284,405	86%	98,432,000.00	86%	90%	100%	115,000,000.00	100%	335,206,500.00	1%	279%
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentasi jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kegiatan	7.00	119,970,000.00	10.00	121,774,500.00	7.00	109,284,405	6.00	98,432,000.00	86%	90%	7.00	115,000,000.00	7.00	335,206,500.00	100%	279%
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100.00	67,500,000.00	87.50	78,798,100.00	100%	39,419,400.00	50%	39,383,000.00	50%	100%	100%	41,000,000.00	100%	159,181,100.00	1%	236%
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	2.00	67,500,000.00	4.00	78,798,100.00	2.00	39,419,400.00	2.00	39,383,000	1.00	100%	2.00	41,000,000.00	2.00	159,181,100.00	100%	236%
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	%	100.00	24,012,450.00	100.00	38,400,000.00	100%	19,200,000.00	50%	18,300,000.00	50%	95%	100%	22,000,000.00	100%	78,700,000.00	1%	328%
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1.00	24,012,450.00	2.00	38,400,000.00	100.00	19,200,000.00	1.00	18,300,000.00	1%	95%	1.00	22,000,000.00	1.00	78,700,000.00	100%	328%
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa	%	100.00	6,600,000.00	100%	30,825,000.00	100%	11,250,000.00	25%	11,200,000.00	25%	100%	100%	25,000,000.00	100%	67,025,000.00	1%	1016%
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	Desa	12.00	6,600,000.00	24.00	30,825,000.00	12.00	11,250,000.00	12.00	11,200,000.00	100%	100%	12.00	25,000,000.00	12.00	67,025,000.00	100%	1016%

Tabel 2.1 (Tabel TC-29 T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Toba)

7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	100.00	2,222,449,498.00	70.00	3,170,503,239.00	100%	1,836,159,540.00	40.92%	1,688,111,725.00	41%	92%	100%	1,953,674,706.00	100%	6,812,289,670.00	1%	307%
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100.00	18,000,000.00	100.00	14,450,000.00	100%	9,500,000.00	100%	9,400,000	100%	99%	100%	12,000,000.00	100%	35,850,000.00	1%	199%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan yang tertangani	%	100.00	1,820,358,432.00	100.00	2,698,861,327.00	100%	1,614,093,800.00	100%	1,502,752,575.00	100%	93%	100%	1,572,199,000.00	100%	5,773,812,902.00	1%	317%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100.00	176,475,706.00	100.00	114,048,712.00	10000%	61,698,530.00	10000%	58,008,500.00	100%	94%	100%	178,475,706.00	100%	350,532,918.00	1%	199%
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	75.00	39,000,000.00	36.67	97,014,000.00	7400%	12,599,610	1850%	4,329,000	25%	34%	74%	40,000,000.00	70%	141,343,000.00	1%	362%
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100.00	93,615,360.00	100.00	114,065,700	100%	73,120,000	100%	49,135,000	100%	67%	100%	52,000,000.00	100%	215,200,700.00	1%	230%
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	75.00	75,000,000.00	102.22	132,063,500	74%	65,147,600.00	74%	64,486,650	100%	99%	74%	99,000,000.00	72%	295,550,150.00	1%	394%
						TOTAL				2,440,531,948.00		3,440,300,839.00		2,015,313,345.00		1,855,426,725.00	50%	95%		2,156,674,706.00	1.00	7,452,402,270.00	1%	433%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonatua Lunasi

Kinerja Satuan Perangkat Daerah dapat diukur dari berbagai indikator, yang tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan pelimpahan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Toba satu-satunya urusan wajib yang diserahkan adalah dengan diterapkannya pelayanan administrasi terpadu satu pintu di Daerah, Pemerintah dan Masyarakat selaku stake holder.

Adapun tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Bonatua Lunasi meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas okum lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oknum kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Titik tolak Kinerja yang jelas dengan adanya SDM Kecamatan Bonatua Lunasi;
- Perjanjian/penandatanganan fakta Integritas antara Bupati Toba dengan Camat dalam pelaksanaan target kinerja;
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;

- Kewenangan koordnansi di tingkat kecamatan;
- Tersedianya sarana dan prasarana;

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Sarana dan prasarana desa yang belum memadai khususnya Sarana dan Prasarana Kantor Desa yang sangat minim
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan public
- Posisi/letak Kecamatan Bonatua Lunsu yag strategis yang berada di jalur Lintasan Jalan Nasional dan provinsi
- Adanya sumber-sumber potensial dari pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu termasuk para perantau dalam upaya marsipature hutanabe
- Keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa terjaga.

Tantangan :

- Tuntutan masyarakat yang semakin beragam terlalu berharap kepada pihak lain untuk memperbaiki kehidupan;
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Dukungan fasilitas terhadap warga yang kreatif, inovatif;
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintahan;
- Kebijakan instansi teknis bagi masyarakat mendukung pemberdayaan masyarakat;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.30. berikut :

Tabel 2.2 (Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Daftar Usulan Kegiatan Kecamatan)

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	IKU													
	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan di Kecamatan			82.96%	85.03%	87.11%	89.43%	91,33%	85.50%	74,27%	87.11%	100%	91,33%	
	Persentase layanan administrasi pemerintahan umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	IKS (Indikator Kinerja Sasaram)													
	Presentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik			87.5%	88.13%	88.75%	89.38%	90%	50.45%	42,86%	88.75%	100%	90%	
	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan			77.33%	81%	84,67%	88.33%	90,33%	73.63%	87,50%	84,67%	100%	90,33%	
	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Desa yang melaksanakan integrasi, sinergi, dan trobosan dalam pemerintahan desa			100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	
	Presentase layanan administrasi yang tertangani			88%	89%	89%	90%	90%	56.48%	72,02%	89%	100%	90%	
3	IKP (Indikator Kinerja Program)													
	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	50.45%	42,86%	100%	100%	100%	
	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	73.63%	87,50%	100%	100%	100%	
	Persentase desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase desa tertib administrasi Pemerintahan desa			100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	100%	56.48%	72,02%	100%	100%	100%	

Tabel 2.2 (Tabel T-C. 30.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Daftar Usulan Kegiatan Kecamatan)

[illegible]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bonatua Lunasi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bonatua Lunasi dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan sejauh ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai banyak keberhasilan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan publik antara lain agar setiap urusan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien seperti pelayanan kependudukan, proses perizinan dan terfasilitasinya proses pembangunan, terbinanya kelompok masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kedudukan hak dan kewajibannya.

Dalam proses pelaksanaan dilapangan meskipun telah direncanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul yang berpengaruh dalam kegiatan kerja terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonatua Lunasi. Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya berdampak pada kurang maksimalnya mekanisme program kerja yang telah direncanakan, dari beberapa Permasalahan tersebut diperlukan isu isu strategis yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya alat moda transportasi dan perangkat komputer sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.

4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Pengembangan dalam meningkatkan pengetahuan dari aparatur yang ada di kantor Camat Bonatua Lunasui guna dapat menyikapi perkembangan dunia saat ini dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat..

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain banyaknya anak rantau asal Bonatua Luasi yang telah berhasil untuk dapat diajak berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi Kecamatan seperti prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata, perikanan danau dan pengembangan industri rumah tangga.

2.4 Review terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Bonatua Lunasi

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Kecamatan Bonatua Luasi, banyak proses yang dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Bonatua Lunasi Tahun 2026 ini merupakan perbaikan berupa finalisasi setelah menerima masukan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba.

Review terhadap Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonatua Lunasi 2024 dapat dilihat pada Tabel TC.31 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BONATUA LUNASI											
NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Bonatua Lunasi	Nilai Evaluasi Internal AKIP	71%	2,036,950,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Bonatua Lunasi	Nilai Evaluasi Internal AKIP	71%	2,036,950,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	2,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,844,523,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,844,523,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1,844,523,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1,844,523,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba)

Administrasi Umum Perangkat Daerah				56,507,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				56,507,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000	
Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Paket	7,507,000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Paket	7,507,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	25,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	25,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59,920,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59,920,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	46,920,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	46,920,000	

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	52,627,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	52,627,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	6,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	6,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6,373,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6,373,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kesesuaian Layanan dengan SOP		26,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				26,000,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20,000,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	20,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	3,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	3,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Laporan	3,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Laporan	3,000,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		21,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				21,000,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				18,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				18,000,000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	3,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	3,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3,000,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga	3,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga	3,000,000	

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba)

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan		3,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3,000,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3,000,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3,000,000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	3,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	3,000,000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		89,200,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				89,200,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				89,200,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				89,200,000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	50,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	50,000,000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	20,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	20,000,000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		19,200,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		19,200,000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Tingkat Pembinaan Desa		10,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				10,000,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan				10,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan				10,000,000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10,000,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10,000,000	
	JUMLAH				2,186,150,000					2,186,150,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu dilengkapi dengan data usulan dan rencana Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Kecamatan Bonatua Lunasi dalam merancang program dan kegiatan Pembangunan satu tahun kedepan pasti mempertimbangkan proses pembangunan yang sedang berlangsung, hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya disusun dalam suatu blu print atau Data Pembangunan Kecamatan Bonatua Lunasi untuk dirumuskan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Bonatua Lunasi yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun dana bantuan dari masyarakat/stake holder. Adapun Data Usulan Pembangunan Kecamatan Bonatua Lunasi sebagaimana dijabarkan dalam tabel T-C. 32 berikut:

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Tahun 2026)

Perangkat Daerah : KECAMATAN BONATUA LUNASI						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	
N I H I L			I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan skala prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta kendala-kendala yang bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart fungsi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance dan bersih (clean governance).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Bonatua Lunasi untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik Kecamatan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan

3.2. RENJA KECAMATAN BONATUA LUNASI

Bertitik tolak pada Visi dan Misi yang diemban, maka Kecamatan Bonatua Lunasi mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	76%

2. Sasaran :

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP	71%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%
3	Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Desa	Tingkat Pembinaan Desa	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan Yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Bonatua Lunasi, maka disusun program kerja Kecamatan Bonatua Lunasi dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas.

Program dan Kegiatan Kecamatan Bonatua Lunasi tahun 2026 terdiri dari 6 Program 13 Kegiatan dan 26 sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Fasilitas kunjungan tamu
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
- b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a). Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan disajikan dalam tabel Tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel 3.1 (Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2026	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan									
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target							
1	2	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15	16	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN														
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Internal AKIP	71	Persen		100	Persen		100	Persen	2,036,950,000	2,176,114,000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen				5,000,000	20,000,000			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	2,500,000	10,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	22	laporan	2,500,000	10,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Cakupan layanan administrasi keuangan	100	Persen				1,844,523,000	1,887,114,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18	Orang/ Bulan	1,844,523,000	1,867,114,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang	-	20,000,000			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Cakupan layanan administrasi	100	Persen				56,507,000	95,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	3,000,000	4,000,000			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	15,000,000	15,500,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	3,000,000	6,500,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3,000,000	6,500,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	7,507,000	12,500,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	25,000,000	50,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	

**Tabel 3.1 (Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan
Maju Tahun 2027**

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	74	Persen			6,000,000	45,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2		-	10,000,000		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	6,000,000	25,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		-	10,000,000		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100	Persen				59,920,000	61,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	Laporan	13,000,000	13,026,000		Kecamatan Bonatua Lunasi
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	Laporan	46,920,000	47,974,000		Kecamatan Bonatua Lunasi
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Barang Milik Daerah yang Terpelihara	74	Persen				65,000,000	68,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	52,627,000	53,153,000		Kecamatan Bonatua Lunasi
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	16	Unit	6,000,000	7,847,000		Kecamatan Bonatua Lunasi
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	6,373,000	7,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi

Tabel 3.1 (Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kesesuaian Layanan dengan SOP	100	Persen							26,000,000	42,000,000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Presentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%				20,000,000	30,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Kegiatan	20,000,000	30,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.02.2.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										6,000,000	12,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			3,000,000	6,000,000			
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			3,000,000	6,000,000			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100	Persen							21,000,000	52,000,000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Presentase Jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	2	Kegiatan				18,000,000	41,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5	lembaga kemasyara katan	3,000,000	16,000,000			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	15,000,000	25,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										3,000,000	11,000,000			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			3,000,000	11,000,000			

**Tabel 3.1 (Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan
Maju Tahun 2025**

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan								3,000,000	10,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									3,000,000	10,000,000			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	3,000,000	10,000,000			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Persen	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan					89,200,000	107,179,000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					3	Kegiatan			89,200,000	107,179,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan			50,000,000	65,000,000			
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas			20,000,000	22,179,000			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	19,200,000	20,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Pembinaan Desa	100	Persen						10,000,000	16,000,000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	12	Desa			10,000,000	16,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
7.01.06.2.01.0001	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	Laporan	10,000,000	16,000,000		Kecamatan Bonatua Lunasi	
J U M L A H										2,186,150,000	2,403,293,000			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BONATUA LUNASI

4.1 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini menerangkan rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja, sasaran daerah, dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bonatua Lunasi sangat diperlukan untuk mengetahui apakah realisasi hasil program dan keluaran kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil kegiatan yang direncanakan atau belum, bahkan melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian kinerja tahun lalu dapat diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja Perangkat Daerah dapat meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan.

Rencana Kerja dan Pendanaan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Bonatua Lunasi. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pada tahun 2026 Kecamatan Bonatua Memiliki 4 Kegiatan yang menjadi Prioritas utama antara lain meliputi:

1. Program Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Daerah. Dalam Sub Kegiatan ini dilaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang kompatibel untuk mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang optimal
2. Program Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dalam Sub Kegiatan ini dilakukan sistematis Pelaporan Capaian Kinerja yang baik guna memperkuat Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Publik dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kewenangannya pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, didalam Kegiatan ini dilaksanakan Pelayanan Perizinan non usaha kepada masyarakat dengan mempertimbangkan akuntabilitas dan ke efektifan waktu
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Publik dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kewenangannya pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4.2 Pendanaan Kecamatan Bonatua Lunasi

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 diusulkan pendanaannya dari Dana APBD seperti Dana Transfer Umum-Dana alokasi umum dan sumber pendanaan lainnya yang dianggap sah. Lokasi

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah di Kabupaten Toba, Kecamatan Bonatua Lunasi, dan Semua Desa. Kebutuhan pagu indikatif yang direncanakan pada tahun 2026 sebesar Rp. 2.186.150.000,- dan untuk prakiraan maju tahun 2027 sebesar Rp. 2.403.293.000,-

Untuk lebih rinci Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Porsea Tahun 2026 dan prakiraan Maju tahun 2027 sesuai yang telah direncanakan dal hasil analisis kebutuhan serta telah diinput di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat dilihat pada tabel berikut

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BONATUA LUNASI KAB. TOBA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BONATUA LUNASI						2.186.150.000,00							2.385.293.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.186.150.000,00							2.385.293.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.186.150.000,00							2.385.293.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.036.950.000,00						-	2.134.114.000,00	
		[Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	75	65.5	69.36	71	2.036.950.000,00	-	-	-	-	-	-	2.134.114.000,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi	-	20.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		10.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
		-	-	-	-	-	-	2.036.950.000,00	-	-	-	-	-	-	2.134.114.000,00	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				22 Laporan	2.500.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		10.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
		[Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	75	65.5	69.36	71	2.036.950.000,00	-	-	-	-	-	-	2.134.114.000,00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.844.523.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi	-	1.867.114.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				18 Orang/bulan	1.844.523.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		1.867.114.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	56.507.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi	-	95.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		4.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		15.500.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		6.500.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		6.500.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	7.507.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		12.500.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		50.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi	-	25.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	6.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		25.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi	-	61.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	13.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		13.026.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	46.920.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi		47.974.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kecamatan Bonatua Lunasi	-	66.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			undefined undefined	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat	-	30.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat	-	9.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga K emasyarakatan	3.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		16.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		60.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
		-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	79.000.000,00	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat	-	3.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga K emasyarakat an	3.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	Masyarakat		3.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	3.000.000,00						-	10.000.000,00	
		[Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan]	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan	100	0	100	100	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	3.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	Masyarakat	-	10.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	89.200.000,00						-	107.179.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan]	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	0	100	100	89.200.000,00	-	-	-	-	-	-	107.179.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	89.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat	-	107.179.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	50.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		65.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				400 Orang	20.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		22.179.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	19.200.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	10.000.000,00						-	16.000.000,00	
		[Meningkatnya pembinaan desa]	Tingkat Pembinaan Desa	100	0	0 100	100	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat	-	16.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		16.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	J U M L A H							2.186.150.000,00							2.385.293.000,00	

BAB V

PENUTUP

RENJA Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lumban Lobu, Agustus 2025

CAMAT BONATUA LUNASI



JUDIMAN SILITONGA, SE
PEMBINA/IVa
NIP. 19680929 198803 1 001